

KETERLIBATAN INDONESIA DALAM PRA MEDIASI ARAB SAUDI DAN IRAN TAHUN 2016

Gian Angga Fauzi¹
Nim. 1002045182

Abstract

The conflict between Saudi Arabia and Iran began when the Shia scholars from Iran were executed by the Saudi Arabian government. The purpose of this study is to seek pre-mediation Indonesia in the establishment of the conflict of Saudi Arabia and Iran. This problem is analyzed using the concept of conflict, mediation and national interest for Indonesia's pre-mediation against the conflicts of Saudi Arabia and Iran. This responded to the Iranian community and there was an attack on the Saudi embassy in Tehran. With the attack finally, Saudi Arabia cut off diplomatic relations with Iran. Indonesia as a partner of the two countries has offered to help the settlement of peace. Indonesia's involvement in assisting the conflict between Saudi Arabia and Iran is supported by domestic organizations and Indonesia also has a national interest in both countries.

Keywords : *Conflict between Saudi Arabia and Iran, Indonesia, Pre Mediation*

Pendahuluan

Arab Saudi dan Iran adalah dua negara di Timur Tengah yang sejak lama memiliki hubungan yang tidak baik dimana Arab Saudi menganut paham Sunni dan menjadi pusat kegiatan ritual Islam karena tiap tahun jutaan umat Islam menuju dua masjid suci yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Madinah untuk menjalankan haji dan umrah. Selain itu Arab Saudi dengan minyaknya menjadi kekuatan energi yang menentukan maju mundurnya perekonomian dunia. Sedangkan Iran adalah kelanjutan dari kerajaan kuno Persia yang menjadi bagian dari sejarah perkembangan peradaban manusia. Dengan menegaskan diri sebagai Muslim Syiah, Iran berusaha mengembangkan pengaruhnya di kawasan Timur Tengah terutama di daerah-daerah dengan mayoritas penduduk penganut Syiah.²

Hubungan antara Republik Islam Iran dan Kerajaan Arab Saudi semakin memburuk ketika terjadi revolusi Iran pada tahun 1979. dikarenakan adanya perbedaan ideologi politik yang mana Arab Saudi dikuasai seorang raja dan bentuk pemerintahannya adalah Islam konservatif sedangkan Iran memiliki bentuk Islam yang lebih revolusioner dan pemimpin revolusi tahun 1979 Ayatollah Khomeini memandang mornarki tidak sesuai dengan Islam. Agenda berhaluan Islam Syaih diluncurkan pada

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: giananggafauzi@yahoo.com

revolusi 1979 dipandang sebagai suatu penetangan terhadap rezim konservatif Sunni terutama dikawasan teluk dan terdapat kecurigan mendalam Arab Saudi terkait usaha Iran untuk mengekspor revolusinya ke negara-negara tetangga. Selain itu terpecahnya hubungan mereka terjadi berbagai masalah-masalah kebijakan ekspor minyak dan hubungan dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya serta program nuklir Iran.

Pada tahun 2016 hubungan Arab Saudi dan Iran kembali memburuk dikarenakan ulama Syiah yaitu Syaikh Nimr Baqr Al-Nimr dari Iran yang mendukung kemerdekaan Qatif dan Al-Ahsa dua wilayah di Arab Saudi yang berpenduduk mayoritas kaum Syiah untuk menuntut hak-hak legal bagi warga Syiah di Arab Saudi. Syaikh Nimr Baqr Al-Nimr dinyatakan bersalah melakukan delapan tindakan kejahatan karena mengeluarkan kritikan terhadap pemerintah. Kritiknya kepada keluarga raja diketahui sangat keras. Syaikh Nimr mengkritik pemerintah Arab Saudi karena adanya diskriminasi terhadap warga Syi'ah dibidang pendidikan, pekerjaan, agama, jaminan hukum, dan sektor-sektor lainnya.

Pada Maret 2009, Al-Nimr mengkritik pemerintah Saudi dan mengancam bahwa jika hak syiah di Saudi tidak dihormati, maka akan memimpin sebuah gerakan untuk separatis di wilayah Qatif dan Al-Ahsan dengan tujuan membentuk sebuah negara Syiah dengan Bahrain. Selain itu, Nimr juga membentuk organisasi independen yang dinamakan Al-Awamiyah di Provinsi Timur, Arab Saudi. Pada tahun 2012 Nimr menuding media dan pejabat-pejabat Saudi menutup-nutupi "penindasan tirani" pasukan pemerintah, yang disebutnya sebagai pasukan pembuat kekacauan. Selain itu, Nimr di Arab Saudi juga menyerukan kepada demonstran untuk melawan pasukan keamanan dengan menggunakan kata-kata daripada kekerasan. Dia juga mengajak warga masyarakat bangkit melakukan perlawanan dan ketidakpatuhan publik, serta menuding kerajaan Arab Saudi membunuh orang-orang Syiah. Akibat dari aksinya tersebut, Nimr ditangkap dan dijebloskan kedalam penjara.

Pada tanggal 2014, Al-Nimr dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Pidana Khusus dengan dakwaan melawan pemerintah. Kemudian pada tahun 2016 eksekusi mati Nimr dilaksanakan bersamaan dengan 46 tahanan lainnya. Eksekusi mati terhadap Nimr menuai respon dari rakyat Iran yang melakukan unjuk rasa dan mencoba masuk ke dalam gedung, menghancurkan dan membakar kedutaan besar Arab Saudi di Teheran dan konsulat Arab Saudi di Mashhad. Pasca unjuk rasa tersebut, Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Iran dan meminta diplomat Iran untuk meninggalkan Arab Saudi. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Hossein Jaber Ansari, Arab Saudi hanya menggunakan insiden penyerangan kedutaan sebagai alasan untuk meningkatkan ketegangan.

Dengan adanya konflik tersebut Indonesia sebagai mitra kerjasama Arab Saudi dan Iran menawarkan diri untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Keterlibatan Indonesia dalam konflik tersebut dibantu oleh OKI, Indonesia memiliki keinginan bertujuan untuk memajukan kerjasama internasional dengan negara-negara Islam. kemudian untuk meningkatkan solidaritas Islam diantara negara anggota, mengoordinasikan kerjasama antar negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi tempat-tempat suci Islam. Penyelesaian

permasalahan konflik Arab Saudi dan Iran memerlukan kerjasama yang baik dengan negara-negara Islam melalui OKI. Oleh karena itu, Indonesia berharap agar konflik ini tidak membesar dan segera dapat diselesaikan sehingga tidak menimbulkan perang. Dengan adanya konflik tersebut Indonesia sebagai mitra kerjasama Iran dan Arab Saudi menawarkan penyelesaian konflik agar terciptanya perdamaian di kawasan Asia Timur Tengah. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Keterlibatan Indonesia dalam menyelesaikan konflik Arab Saudi dan Iran pada tahun 2016”

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Teori Konflik

Konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (kelompok) dimana salah satu pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Menurut Peter Wallensteen, konflik dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu : konflik antar-negara (*interstate conflict*), konflik internal negara (*internal conflict*), dan konflik pembentukan negara (*state formation conflict*)

K.J. Holsti membagi konflik menjadi enam jenis, yaitu : (K.J. Holsti dan M.Tahrir Azhari, : Jakarta, 1983.).

1. Konflik wilayah terbatas, dimana terdapat pandangan yang tidak cocok dengan acuan pada pemilikan suatu bagian khusus wilayah atau pada hak-hak yang dinikmati oleh suatu negara atau di dekat wilayah negara lain.
2. Konflik yang berkaitan terutama dengan komposisi pemerintah. Tipe konflik ini sering mengandung nada tambahan ideologis yang kuat, maksudnya adalah menjatuhkan rezim dan sebagai gantinya mendirikan suatu pemerintahan yang cenderung lebih menguntungkan kepentingan pihak yang melakukan intervensi.
3. Konflik kehormatan nasional, dimana pemerintahan mengancam atau bertindak untuk membersihkan pelanggaran tertentu yang telah diduga.
Imperialisme regional, dimana suatu pemerintah berusaha menghancurkan kemerdekaan negara lain, biasanya demi kombinasi tujuan ideologis, keamanan, dan perdagangan.
4. Konflik pembebasan atau perang revolusioner yang dilakukan oleh suatu negara untuk “membebaskan” rakyat yang lain, biasanya karena alasan-alasan etnis atau ideologis.
Konflik yang timbul dari tujuan suatu pemerintah untuk mempersatukan negara yang terpisah.

Konsep Mediasi

Mediator dalam menjalankan perannya hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran atau menentukan proses mediasi dalam mengupayakan penyelesaian sengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan dan peran menentukan dalam kaitannya dengan isi persengketaan, ia hanya menjaga bagaimana proses mediasi dapat berjalan, sehingga menghasilkan kesepakatan (*agreement*) dari para pihak. Proses mediasi dibagi dalam tiga tahap, yaitu: (Syahrizal Abbas, : Jakarta, Kencana, 2009).

Pertama, tahap pra mediasi. Tahap ini merupakan tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar di mulai. Langkah-langkah yang dilakukan oleh mediator pada tahap ini adalah: membangun

kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi kepada para pihak, fokus pada masa depan, mengkoordinasikan para pihak, mewaspadai perbedaan sosio-kultural para pihak, menentukan siapa yang hadir, tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, menciptakan rasa aman bagi kedua pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisian mereka. *Kedua*, tahap pelaksanaan mediasi. Pada tahap ini para pihak sudah berada dalam satu mejelis dan memulai proses mediasi. Langkah –langkah dalam tahap ini adalah: sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan, merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan dan penutup mediasi. *Ketiga*, tahap akhir implementasi hasil mediasi. Dalam tahap ini para pihak menjalankan hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam bentuk perjanjian tertulis sesuai dengan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama proses mediasi.

Teori Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan tujuan negara untuk mempertahankan dan menambah kekuasaan ke negara lain. Kepentingan nasional sendiri dapat mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, keamanan, diplomasi, ataupun aspek-aspek lain yang bertujuan untuk melindungi aset-aset diplomatik negara. Kepentingan nasional merupakan kepentingan kolektif dari setiap individu atau warga negara dalam suatu negara, itu artinya negara harus menekankan perhatian kepada suatu kepentingan dan menunda kepentingan-kepentingan yang sebenarnya memang tidak terlalu penting untuk segera diwujudkan. Menurut Morgenthau, kepentingan nasional didasarkan bahwa strategi diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasional. Kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Morgenthau menyatakan bahwa perilaku negara dalam hubungan internasional dituntun oleh pengejaran kepentingan nasional, dan kepentingan nasional itu adalah memperoleh, mempertahankan, dan memperbesar kekuatan negara. (Mochtar Mas'oed. Jakarta)

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam proposal penelitian ini adalah deskriptif, yaitu berupaya untuk menggambarkan keterlibatan Indonesia dalam pra mediasi Arab Saudi dan Iran

Hasil Penelitian

Arab Saudi dan Iran memiliki hubungan yang terbilang kurang akur. Konflik kedua negara tersebut bermula dari pergantian kepemimpinan setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW untuk menjadi penerus. Pergantian kepemimpinan ini menyebabkan lahirnya dua kelompok yaitu kelompok yang melegitimasi kepemimpinan Abu Bakar dan kelompok yang menjadi pengikut setia Ali bin Abi Thalib. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kaum Sunni mengangkat Abu Bakar untuk menjadi khalifah pertama lalu dilanjutkan Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Di sisi lain, kelompok Syiah berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib yang merupakan sepupu dan menantu Nabi Muhammad SAW adalah sosok

yang pantas menjadi penerus kepemimpinan umat. Muslim Syiah percaya bahwa Ali bin Abi Thalib dipilih langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Kaum Syiah juga menolak kepemimpinan dari ketiga khalifah Sunni.

Awal hubungan Arab Saudi dan Iran semakin memburuk ketika adanya Revolusi Iran pada tahun 1979. Pada awalnya, Pemerintah Arab Saudi mengakui pemerintahan baru dan Raja Khalid mengirim surat kepada Ayaatollah Khomeini yang berisikan ucapan selamat atas keberhasilan akan republik baru dan menyatakan kesediaan Arab Saudi untuk melanjutkan hubungan baik mereka dan membangun kerjasama yang menekankan pada “solidaritas Islam” sebagai dasar dari kedekatan hubungan antara Arab Saudi dan Iran. Pada pertengahan 1979, Iran mulai menyatakan dukungannya terhadap isu-isu Syiah di kawasan Timur Tengah dan Khomeini juga menegaskan bahwa peran Iran adalah sebagai pengekspor revolusi. Akan tetapi, Transformasi Iran menjadi negara Syiah membuat Arab Saudi (Sunni) harus meningkatkan pengaruh Wahabi di kawasan Timur Tengah.

Revolusi Iran menciptakan pertempuran sekterian yang besar antara Sunni dan Syi'ah. Arab Saudi dan Iran terus berusaha mengembangkan pengaruh mereka di Kawasan Timur Tengah melalui penyebaran budaya dan politik mereka, terutama melalui inti religiunitas penduduk di Timur Tengah. Arab Saudi, melalui startegi penguatan Islam berusaha untuk menggagalkan Khomeini dan membatasi kebangkitan Syi'ah. Kekayaan minyak yang dimiliki oleh Arab Saudi memberikan Arab Saudi kemampuan tidak hanya menolak tantangan Khomeini, tetapi juga kemampuan untuk memengaruhi muslim dunia untuk merebut pesan Iran. Arab Saudi mulai mendorong sekterianisme, menyebabkan identitas Sunni untuk melawan Syi'ah dan mendukung pemerintah Sunni untuk menundukkan aktivisme Islam serta setiap upaya untuk reformasi politik.

Kemudian pada tahun 1980-1988 hubungan Arab Saudi dan Iran kembali memanas menyusul perang Iran-Irak. Saat berkobar perang Iran-Iran. Pertempuran tersebut didasari oleh peran Ideologi Iran dan geopolitik wilayah Irak. Salah satu isu yang muncul adalah persaingan budaya lama antara Arab Saudi dan peradaban Persia. Meskipun Arab Saudi memiliki masalah tersendiri dengan Irak, Arab Saudi tetap menyatakan dukungannya terhadap rezim Saddam Hussein di Baghdad. Riyadh bahkan memberikan sumbangan dana sebesar 25 milyar US Dollar dan mendesak negara-negara teluk untuk menyumbangkan dana perang untuk Irak. Untuk menutupi biaya tersebut, Arab Saudi meningkatkan produksi minyak mentah di negaranya, yang mengakibatkan runtuhnya harga minyak mentah dunia.

Pada tahun 1987, Arab Saudi dan Iran kembali memanas jemaah haji Iran setiap tahun selalu berdemonstrasi di Mekkah dan Madinah untuk menentang Israel. Akan tetapi, pada 1987, polisi anti huru hara Arab Saudi memblokade jalan menuju Masjidil Haram. Akibatnya, terjadi bentrokan antara polisi anti huru hara Arab Saudi dan demonstran Iran. Sekitar 402 orang tewas (sebagian besar umat Syiah Iran) dan 649 luka-luka. Tak hanya itu, bentrokan tersebut juga membuat massa Iran semarin marah dan membalasnya dengan cara menduduki kedutaan besar Arab Saudi dan Kuwait. Seorang diplomat Arab Saudi tewas karena terjatuh dari jendela kedutaan. Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini, kemudian mendeklarasikan

bahwa monarki Saudi bidah. Hubungan diplomatik kedua negara pun terputus selama empat tahun.

Pada April 2001 hubungan Arab Saudi dan Iran membaik pasca pemilihan umum presiden Iran yaitu Mohammad Khatami terpilih dan melakukan kunjungan resmi pertama Presiden Iran ke Arab Saudi sejak revolusi Iran 1979. Setelah itu, Iran dan Arab Saudi menandatangani perjanjian keamanan. Raja Fahd memberikan selamat kepada Mohammad Khatami terpilih menjadi presiden Iran pada 2001. Fahd menilai Khatami akan memberikan kebijakan reformis. Khatami berupaya untuk memulihkan hubungan dengan Riyadh. bahkan sebelum menang pada pemilihan 1997 Khatami pun mengunjungi Saudi. Hubungan Iran dan Arab Saudi kembali terpuruk, tepatnya ketika invasi Amerika Serikat di Irak berhasil menggulingkan Saddam Hussein pada 2003. Selama 82 tahun, Irak saat itu didominasi oleh Sunni dan Syiah sebagai minoritas yang tertekan dan terpinggirkan. Penindasan terhadap kaum Syi'ah terlihat sangat jelas di bawah kekuasaan Saddam Hussein dan partai Ba'ath. Pada saat Rezim Saddam Hussein, masyarakat Syi'ah terjadi diskriminasi dan juga dibatasinya kebutuhan manusia yang mendasar, termasuk kesejahteraan psikologis.

Pada 2004, kelompok Syiah Zaidiyah di Yaman melakukan pemberontakan. Arab Saudi menuding Iran telah menghasut dan mencampuri urusan dalam negeri Yaman dengan cara memasok senjata ke Yaman. Sedangkan Iran menuding Arab Saudi telah mengkhianati perannya sebagai mediator konflik dengan membombardir minoritas Houthi di utara Yaman. Pada 2006, terjadi Perang Israel dan Milisi Libanon, Hizbullah. Dukungan Iran terhadap Hizbullah di tunjukkan dengan menyuplai senjata ke Hizbullah. Arab Saudi menaruh curiga Iran mencoba membangun aliansi baru untuk mengancam kepentingan Saudi. Pada 2011, gerakan pro-demokrasi dan anti-rezim telah menjatuhkan rezim di negara— negara Arab, mulai dari Mesir, Tunisia, Libya, dan Yaman, serta telah memicu protes massa dan pemberontakan di banyak negara di seluruh Arab mulai dari Maroko, Aljazair ke wilayah Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah, Bahrain, Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.

Pada 14 Februari 2011, gerakan oposisi di Bahrain mulai menyerukan reformasi konstitusi, pemilu, dan pembebasan tahanan dari khalifa kerajaan. Gerakan ini berhasil melibatkan sebagian besar populasi Syi'ah disana. Pemberontakan Bahrain membuat Arab Saudi takut akan bertambahnya populasi Syi'ah yang memberontak. Kericuhan di Bahrain telah membuat Arab Saudi takut sekutunya akan jatuh dan beralih ke Iran. Arab Saudi mengirim 1000 tentara untuk membantu pemerintah Bahrain untuk menghadang para demonstran yang mayoritas adalah Syiah yang syarat akan kepentingan Iran dan menekan tindakan brutal yang dilakukan oleh demonstran. Pada tahun yang sama, Arab Saudi juga mengambil sikap terhadap program nuklir Iran. Program nuklir Iran sendiri dimulai pada tahun 1970 di era Shah Reza Pahlevi. Isu nuklir menjadi menonjol di era Ahmadinejad. Awalnya, Tujuan program nuklir Iran adalah untuk membangun sektor nuklir. Ketakutan Arab Saudi terlihat dari kecurigaan Arab Saudi akan program energi nuklir Iran pada era Presiden Mahmoud Ahmadinejad. Arab Saudi yakin bahwa Iran bertekad untuk mendominasi kawasan Teluk dan meningkatkan pengaruh politik serta penyebaran syiah di kawasan. Keresahan Arab Saudi diperparah menyusul adanya laporan dari intelejen

yang mengungkapkan ambisi nuklir Iran. Akan tetapi, Iran menegaskan bahwa program nuklir yang mereka rancang hanya untuk tujuan damai.

Sebagai saingan utama dalam ideologi Iran, Arab Saudi telah mengumumkan rencana untuk membangun program nuklirnya sendiri dengan minimal 16 sektor nuklir. Arab Saudi memiliki sejarah bertindak secara sembunyi-sembunyi di arena nuklir, memungkinkan produksi bom Sunni untuk melawan bom Syi'ah. Arab Saudi menganggap bahwa nuklir Iran mengancam stabilitas dunia dan membawa proliferasi nuklir ke Timur Tengah. Pada Tahun 2015, lebih dari 400 jemaah haji Iran meninggal di terowongan Mina akibat panic massa. Iran menuding pemerintah Arab Saudi ikut bertanggungjawab dalam tragedy ini. Sebaliknya, Arab Saudi menyelipkan isu bahwa tragedy itu disebabkan oleh jemaah haji Iran yang tidak mau diatur. Kisruh pun memuncak saat pangeran Arab Saudi, Khalid bin Abdullah, mendesak agar Riyadh melarang masuk jemaah haji Iran.

Pada tahun 2016, pemerintah Arab Saudi mengeksekusi seorang ulama Syiah yaitu Syaikh Nimr Baqr Al-Nimr yang merupakan salah satu kiritikus kelompok Syiah yang memperjuangkan kesetaraan Syiah di Arab Saudi. Eksekusi mati Nimr dilaksanakan pada 2 Januari 2016 bersamaan dengan 47 tahanan lainnya diantaranya 3 warga Syiah dan 44 lainnya merupakan tahanan yang mengancam keamanan nasional negara Arab Saudi. Dampak dari tindakan Arab Saudi ini menuai respon dari rakyat Iran untuk melakukan unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Arab Saudi di Teheran. Massa mencoba masuk ke dalam gedung, menghancurkan dan memantik api, sebelum akhirnya dibubarkan oleh polisi

Pasca unjuk rasa tersebut, Arab Saudi lantas memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Iran dan meminta diplomat Iran untuk meninggalkan Arab Saudi dalam waktu 48 jam. Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Hossein Jaber Ansari, Arab Saudi hanya menggunakan insiden (penyerangan kedutaan) sebagai alasan untuk meningkatkan ketegangan.

Pasca eksekusi hukuman mati oleh pemerintah Arab Saudi terhadap Nimr Al-Nimr asal Iran bersamaan dengan 46 terpidana lainnya dengan tuduhan terlibat aksi terorisme, konflik kian menyebar di kawasan Teluk dan Timur Tengah. Jika hal tersebut dibiarkan maka memberikan dampak negatif yang ditimbulkan meluas dan mengglobal baik menyangkut gesekan religius-sektarian, ekonomi khususnya minyak, militer dan rebutan dominasi pengaruh kawasan Teluk. Bukan rahasia, Arab Saudi merupakan negara produsen minyak terbesar dunia dan Iran dikenal dengan kemampuan senjata nuklir.

Rivalitas antar kedua negara berpotensi memicu kawasan Teluk menjadi lautan api. Bila eskalasi konflik menjadi perang, maka negara-negara pro Arab Saudi tidak akan tinggal diam, begitu pula dengan Iran. Arab Saudi dengan segala kekuatan ekonomi minyak dan senjata modern dari sekutu Amerika dan dukungan sekutu negara-negara teluk akan menjadi kekuatan luar biasa. Demikian pula Iran, sekutunya Rusia, China serta Suriah, Irak dan Yaman tentu tidak akan tinggal diam. Apalagi Iran berpotensi memiliki senjata nuklir, mampu memproduksi berbagai peralatan militer modern yang membuat timpang hegemoni militer di kawasan Teluk.

Konflik tersebut juga diprediksi memicu harga minyak dunia naik karena terganggunya jalur suplai dan produksi dunia. Kemungkinan lainnya malah sebaliknya, harga minyak dunia anjlok karena pihak yang bertikai memproduksi minyak secara besar-besaran untuk biaya perang. Apalagi di Arab Saudi terdapat dua kota suci Islam yakni Mekkah dan Madinah, di Teluk Bab El-Mandeb menjadi jalur suplai 40% ekspor minyak produksi Teluk ke AS dan Eropa, Laut Merah dan Terusan Suez menjadi jalur ekspor-impor internasional, negara-negara kawasan Teluk sebagai pusat bisnis dan keuangan dunia (Dubai, Doha dan Abu Dhabi), serta kekuatan militer Arab Saudi maupun Iran yang kuat, maka dampak negatifnya akan merata secara global.

Dengan adanya konflik ini Indonesia memiliki hubungan yang baik terhadap Arab Saudi dan Iran. Hubungan Diplomatik Indonesia dan Arab Saudi baru secara resmi tercatat didirikan pada tanggal 21 November 1947 atau bertepatan pada 8 Muharram 1367 H karena pada tanggal tersebut Kerajaan Arab Saudi mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia menyetujui untuk mengadakan hubungan diplomatik antara kedua negara. Pada tahun 1955, Arab Saudi membuka kantor kedutaan besarnya di Indonesia yang terletak di Jakarta. Pada tahun 1964 barulah Indonesia membuka kantor kedutaan besarnya di Arab Saudi yang terletak di Jeddah. Kedutaan Besar Republik Indonesia selanjutnya dipindahkan dari Jeddah ke Riyadh pada 29 September 1985. Perwakilan Indonesia di Jeddah kemudian diubah statusnya menjadi Konsulat Jenderal Indonesia.

Hubungan antar keduanya kemudian diperkuat dengan mengadakan kerjasama di bidang agama, budaya, serta politik. Hal ini dipermudah karena adanya saling pengertian dalam adanya isu-isu pada hubungan bilateral maupun internasional sehingga ketertarikan tersebut memperkuat keinginan keduanya dalam melakukan kerjasama di bidang ekonomi, pariwisata, investasi, energi, transportasi, dan ketenagakerjaan. Sedangkan hubungan diplomatik Indonesia dan Iran dibuka tahun 1950 pada tingkat kedutaan. Kepala perwakilan RI yang pertama adalah Mayjen R.H. Abdul Kadir yang bergelar Duta Besar dan Menteri berkuasa penuh RI. Pada tahun 1960 kedutaan RI dinaikkan tingkatnya menjadi Kedutaan Besar RI. Pemerintah RI kemudian menunjuk M Bachmid sebagai duta besar LBBP RI yang pertama.

Indonesia memiliki kedutaan di Tehran dan Iran juga memiliki kedutaan besar di Jakarta. Ditingkat global kedua negara adalah anggota penuh gerakan Non-Blok (GNB) dan kelompok D-8. Kerjasama yang dilakukan antar kedua negara tersebut meliputi 3 bidang yaitu bidang politik, budaya, dan ekonomi. Dalam Hubungan politik kedua negara berjalan dengan baik yang antara lain ditandai dengan saling kunjung Kepala Negara/Pemerintah. Presiden Mahmoud Ahmadinejad berkunjung ke Indonesia pada tahun 2006 dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan balasan ke Iran pada tahun 2008. Kedua negara saling memberikan dukungan dalam pecalonan pada jabatan atau keanggotaan organisasi internasional.

Indonesia dan Iran terus berupaya untuk memanfaatkan berbagai peluang untuk meningkatkan hubungan perdagangan kedua negara. Iran merupakan sahabat dan mitra strategis bagi Indonesia. Hubungan bilateral kedua negara semakin erat pasca pertemuan bilateral kedua negara di KTT KAA serta KTT luar biasa OKI bulan

Maret 2016. Momentum tersebut juga kian terjaga pasca implementasi JCPOA yang mencabut sebagian sanksi ekonomi terhadap Iran. Sebagai mitra baik kerjasama Indonesia dengan kedua negara tersebut hal ini sebagai dasar Indonesia terlibat dalam menengahi konflik. Adapun bentuk keterlibatan Indonesia dalam menengahi konflik Arab Saudi dan Iran adalah:

Keterlibatan Indonesia dalam pra mediasi Arab Saudi dan Iran

Eksekusi mati terhadap tokoh ulama Syiah di Arab Saudi, Sheikh Nimr al-Nimr, telah mengantarkan konflik antara Arab Saudi dan Iran ke permukaan yang lebih kasatmata. Sebagaimana diberitakan, menyusul aksi penyerangan terhadap Kedutaan Besar Arab Saudi di Teheran, Riyadh memutuskan hubungan diplomatik dengan Teheran. Krisis hubungan antardua negara yang saling berpengaruh di kawasan ini pun muncul ke permukaan dan menjadi konfigurasi konflik utama di panggung Timur Tengah. Timbul kekhawatiran di masyarakat internasional akan implikasi dari krisis hubungan Arab Saudi-Iran tersebut terhadap stabilitas kawasan, mengingat konflik keduanya telah menghasilkan perang tidak langsung (proxy war) di beberapa negara Timur Tengah. Masyarakat internasional, termasuk Indonesia, sudah seharusnya membantu terwujudnya perdamaian di kawasan Timur Tengah tersebut.

Tahap Pra mediasi

Indonesia telah melihat bahwa peristiwa yang terjadi khususnya terhadap Arab Saudi dan Iran merupakan konflik yang berawal dari agama hingga ke politik. Dengan adanya konflik ini hal ini berdampak stabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah yang mana Arab Saudi dan Iran ingin menyebarkan ideologi agama mereka di kawasan Timur Tengah. Pemerintah Indonesia melalui Kemenlu menyampaikan keprihatinan atas situasi yang terjadi di kawasan Timur Tengah, termasuk situasi yang saat ini sedang terjadi antara Iran dan Arab Saudi. Pemerintah Indonesia menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri dan menghindari tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya eskalasi keadaan yang membahayakan stabilitas dan keamanan kawasan.

Langkah awal Indonesia dalam menangani permasalahan ini yakni membangun kepercayaan dengan membantu pemerintah Arab Saudi dan Iran. Kepercayaan ini dapat dilihat dengan Keseriusan Indonesia untuk menengahi konflik Arab Saudi dan Iran ini ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dengan mengirim Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi ke Arab Saudi dan Iran. Pada tanggal 13 Januari 2016, Menlu Retno telah bertemu dengan Menlu Iran Mohammad Javad Zarif dan Presiden Hassan Rouhani untuk menyerahkan surat dari Presiden RI Joko Widodo yang berisi tentang pandangan dan keprihatinan Indonesia soal hubungan Iran dan Arab Saudi.

Didalam surat tersebut Presiden Joko Widodo juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk membantu membenahi kedua Negara. Pada 18 Januari 2016, Menteri Retno juga menyampaikan pesan perdamaian dari Presiden Joko Widodo kepada Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud di Istana Al-Yammah, Riyadh. Dalam surat tersebut menekankan pada pentingnya stabilitas dan perdamaian kawasan, dan pentingnya hubungan baik antara Arab Saudi dan Iran, serta kesediaan Indonesia untuk

membantu memperbaiki situasi hubungan Arab Saudi dan Iran. (<http://nasional.kompas.com/read//Indonesia.dan.Mediasi.Konflik.Arab.Saudi-Iran>)

Selain itu Juru Bicara Kementerian luar negeri Republik Indonesia Arrmanatha Nasir mengatakan, Menlu Retno LP Marsudi telah menghubungi Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) serta Menlu Arab Saudi dan Menlu Iran guna membantu mencari solusi terbaik secara damai. Pada 21 Januari 2016, Presiden Jokowi telah menyampaikan pesan damai dan solusi politik antara konflik Arab Saudi dan Iran di dalam pertemuan Tingkat Menteri Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Jeddah. Pesan damai tersebut telah menjadi bagian dari *Communique PTM* Luar Biasa OKI. Dan hasil dari pesan tersebut Indonesia telah mengusulkan dibentuknya suatu mekanisme sejenis *Code of Conduct* (COC) yang berisi prinsip-prinsip membangun kepercayaan (*trust building*), menghormati kedaulatan negara lain, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Pada 14-15 April 2016 dalam pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi kerjasama Islam (OKI) ke-13 di Istanbul, Turki. Isi Deklarasi Istanbul mencerminkan hegemoni Arab Saudi di OKI sekaligus menunjukkan perseteruannya dengan Iran. Hal ini dibiarkan oleh Turki karena kesamaan kepentingan keduanya di Suriah dan Yaman. Deklarasi Istanbul memang mencerminkan situasi Timur Tengah saat ini. Namun di akhir KTT, OKI mengeluarkan 208 butir Deklarasi Istanbul, yang lima di antaranya mengecam intervensi Iran di sejumlah negara Arab dan menuduh Hizbullah dukungan Iran sebagai kelompok teroris. Akibatnya, Presiden Iran, Hassan Rouhani, dan delegasinya walkout dari KTT.

Kepentingan Nasional Indonesia dalam pra mediasi Arab Saudi dan Iran ***Kepentingan Ekonomi perdagangan Indonesia terhadap Arab Saudi dan Iran***

Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke negara lain. Modal ekspor (*export*) utama Indonesia adalah kekayaan alam. Dari kekayaan alam yang dimiliki, dapat diproduksi berbagai macam barang ekspor. Barang yang dapat diekspor adalah barang yang diminati dan dibutuhkan oleh pembeli di luar negeri. Pembeli di luar negeri tentu hanya mau membeli barang yang mereka butuhkan dan baik kualitasnya. Salah satu tujuan ekspor Indonesia adalah Timur Tengah dengan berkembangnya kawasan Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab, Qatar dan Oman, maka kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah meningkat. Komoditas yang diperdagangkan Indonesia antara lain adalah kelapa sawit, kertas, dan termasuk indomie yang memiliki pabrik di Dubai.

Salah satu ekspor Indonesia di kawasan Timur Tengah adalah Arab Saudi dan Iran. Membaiknya hubungan Indonesia dan Arab Saudi telah melakukan kerjasama bilateral dalam bidang ekonomi. Komoditi utama ekspor Indonesia ke Arab Saudi seperti Plywood, venner, pakaian jadi, tekstil, kertas dan produk kertas, ban, furniture, electric appliances, electrical machineries. Sedangkan Impor Indonesia dari Arab Saudi berupa Alcohols, phenols, phenol alcohol, hidro-carbon, ethylene, pulp dan sisa kertas, serat sintetik, logam, aluminium, kimia organik, serta migas.

Dalam kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2017, telah diadakan beberapa penandatanganan MoU dan dokumen kerja sama antara kedua negara, termasuk di bidang perdagangan. Menteri

Perdagangan Enggartiasto Lukita menandatangani *Cooperation Program in the Field of Commerce* dengan Menteri Perdagangan dan Investasi Arab Saudi yang diwakili *Minister of State and Member of Council of Ministers* Ibrahim bin Abdulaziz Al Assaf. Penandatanganan dilakukan di Istana Bogor dengan disaksikan oleh Presiden RI Joko Widodo dan Raja Salman. Indonesia dan Arab Saudi sepakat mengembangkan strategi perdagangan luar negeri, melakukan riset pemasaran, mendorong *joint activities* dan *joint courses* bidang perdagangan, dan bertukar informasi perdagangan. Selain itu, kedua negara sepakat berbagi pengalaman di bidang basis data perdagangan serta mendorong partisipasi dunia usaha dalam forum, *workshop*, dan seminar. Indonesia sebenarnya berminat meningkatkan kerja sama perdagangan dengan Arab Saudi melalui *preferential trade agreement* (PTA)/*comprehensive economic partnership agreement* (CEPA).

Program kerja sama yang ditandatangani ini merupakan kesepakatan turunan dari *Economic and Technical Cooperation Agreement between Republic of Indonesia and the Kingdom of Saudi Arabia* yang ditandatangani pada 1981 oleh kedua negara. Dengan terjalannya kerjasama ini adanya peningkatan dalam ekspor Indonesia dalam bidang non migas ke Arab Saudi. Saat ini, total nilai perdagangan Indonesia-Arab Saudi pada 2016 sebesar USD 4,06 miliar atau turun sebesar 25,98% dibandingkan pada 2015. Pada 2016, Arab Saudi merupakan negara tujuan ekspor terbesar Indonesia ke kawasan Timur Tengah dengan nilai ekspor USD 1,33 miliar, sedangkan impor Indonesia dari Arab Saudi sebesar USD 2,73 miliar. Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan dengan Arab Saudi sebesar USD 1,39 miliar pada 2016 karena impor migas yang besar. Sebaliknya untuk ekspor neraca perdagangan nonmigas, Indonesia mendapat surplus sebesar USD 627,5 juta.

Sedangkan Iran, Indonesia telah melakukan kerjasama dengan Iran dalam bidang ekonomi. Komoditi utama ekspor Indonesia ke Iran adalah minyak sawit, pelat/sheets, kertas&karton, rokok, serat tiruan, karet alam, minyak/lemak nabati, ban vulkanisir, sepeda motor, piston mesin, teh hitam. Sedangkan import Indonesia dari Iran berupa bahan kimia anorganik, senyawa logam mulia, bahan bakar mineral, mesin, reactor, boiler, bahan kimia organik, besi dan baja, plastic minuman, alkohol dan cuka. Dalam kunjungan Jokowi ke Iran, akhir Desember 2016, membahas kerjasama ekonomi kedua negara. Ada dua pokok bahasan yang dibicarakan. Pertama, kerjasama di sektor migas. Ayatollah Khamenei menyebutkan potensi kerjasama ekonomi RI-Iran bisa mencapai 20 miliar dollar AS. Bahkan, Iran telah menyetujui Pertamina berinvestasi di ladang minyak Mansouri dan Ab-Teymour. Kedua, Selain kerjasama di bidang energi, Iran juga tertarik dalam bidang infrastruktur serta meningkatkan ekspor dan impor kedua pihak.

Kunjungan Jokowi ke Iran sebagai langkah untuk meningkatkan produksi ekspor RI ke Iran, dimana salah satunya adalah melakukan "*Direct-trade*" dengan adanya *direct-trade* memungkinkan produk RI akan lebih bersaing karena selama ini transaksi perdagangan melalui pihak ketiga. Iran juga berharap agar adanya penerbangan berjadwal dari Teheran ke Jakarta. Penerbangan berjadwal diharapkan bisa meningkatkan sektor pariwisata dan perdagangan kedua negara. Neraca perdagangan Indonesia-Iran mengalami tren penurunan sejak 2011 lalu. Pada 2015, nilai total perdagangan bilateral kedua negara sebesar US\$273,1 juta atau turun 38,51

persen dari 2011 yang mencapai US\$ 1,8 miliar. Adapun per Agustus 2016 nilai perdagangan bilateral hanya berkisar US\$ 150 juta, lebih rendah dari capaian periode sama tahun lalu sebesar US\$195 juta.

Dari pemaparan diatas tersebut Indonesia melakukan kerjasama dengan Arab Saudi dan Iran dalam ekspor dan impor yang cukup baik. Apabila krisis politik negara-negara di Timur Tengah merambat ke Uni Emirate Arab maka akan berdampak pada hubungan dagang Indonesia-Arab dan Iran karena beberapa komoditi yang diekspor Indonesia ke Arab Saudi dan negara Timur Tengah lainnya dilakukan melalui pelabuhan di Dubai. Selain itu, aktivitas perdagangan dengan negara-negara Timur Tengah pasti terhambat jika sampai terjadi perang antara Iran-Arab Saudi. Dua negara tersebut memiliki garis pantai yang panjang di wilayah Timur Tengah dan dengan adanya zona perang, kapal-kapal logistik yang melintas harus berhati-hati dan bisa memperlambat waktu pengiriman barang.

Kepentingan Sosial perlindungan terhadap WNI di kawasan Timur Tengah

Globalisasi telah meningkatkan lalu lintas barang, jasa, dan tenaga kerja melintasi batas-batas kenegaraan. Jumlah pengangguran dan pencari kerja di Indonesia cukup tinggi, sementara penciptaan kesempatan kerja di dalam negeri tidak mampu menyerapnya. Pasar kerja di luar negeri menjadi alternatif bagi tenaga kerja dan pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu dengan bekerja di luar negeri diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, telah menjadi tujuan penting buruh migran Indonesia sejak negara tersebut memulai program migrasi tenaga kerja. WNI yang ada di luar negeri wilayah Timur Tengah adalah wilayah dengan jumlah WNI di luar negeri terbesar setelah kawasan Asia Tenggara. Bahkan dari segi perbandingan negara jumlah WNI di Arab Saudi terbesar kedua setelah Malaysia. Hal ini tentu menjadi perhatian khusus pemerintah terutama setelah kebijakan luar negeri Presiden Joko Widodo sangat menekankan perlindungan WNI di luar negeri sebagai haluan utama kebijakan luar negeri.

Program penempatan TKI ke Arab Saudi sendiri secara resmi di mulai pada tahun 1975. Hal ini disebabkan adanya peristiwa "*boom oil*" pada tahun 1974 di negara Arab Saudi dan negara teluk lainnya, sehingga kebutuhan akan tenaga kerja yang berupah rendah meningkat tajam di negara tersebut. Pada awalnya jumlah TKI yang ditempatkan di Arab Saudi oleh pemerintah sebanyak 25 orang di tahun 1975. Kemudian di tahun 1976 naik menjadi 480 orang dan tahun 1977 meningkat menjadi 2.838. Jumlah penempatan TKI tersebut semakin meningkat, terutama sejak krisis ekonomi Peristiwa "*boom oil*" dimana melonjaknya harga minyak di pasar internasional menyebabkan munculnya masyarakat kelas menengah di Arab Saudi sebagai negara pengeksport minyak dunia. Saat itulah muncul kebutuhan akan pembantu rumah tangga yang menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat kelas tersebut.

Selain itu kerjasama dibidang ketenaga kerja hal ini dapat menguntungkan kedua pihak. Hal ini Arab Saudi dan Iran juga mendapat keuntungan dikarenakan terbantunya oleh adanya tenaga kerja tambah untuk menaikkan perekonomian mereka. Sedangkan Indonesia mendapatkan devisa negara dari TKI yang bekerja di Arab

Saudi maupun di Iran. devisa TKI pada tahun 2014 mencapai USD 8,4 miliar, sedangkan pada tahun 2015 mencapai USD 10,5 miliar kemudian pada tahun 2016 devisa mengalami peningkatan sebesar 24 miliar. Selain pengiriman WNI ke Timur Tengah, Indonesia juga negara terbesar dalam aspek jumlah haji dan umrah. Menurut Saudi Press Agency pada tahun 2016 sebanyak 984,606 jamaah haji yang tiba di Arab Saudi. Mayoritas jamaah haji menempuh perjalanan melalui jalur udara dengan jumlah 930.608 sedangkan yang 11.007 jamaah lainnya menempuh jalur laut, adapun yang menempuh jalur darat tercatat sebanyak 42.991 jamaah. Otoritas Arab Saudi mengakui bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Dari 255 juta jiwa, terdapat 204 juta penduduk beragama Islam.

Dalam kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud pada tanggal 4-5 Maret 2017. Indonesia merasa diuntungkan karena Raja Salman memberikan pengembalian serta penambahan kuota jamaah haji Indonesia mulai tahun 2017. Arab Saudi sebelumnya memutuskan untuk mengembalikan kuota haji Indonesia. Sejak 2013, kuota haji Indonesia dan negara lain dipotong 20 persen karena renovasi Masjidil Haram. Namun, untuk tahun 2017, kuota haji untuk Indonesia kembali normal, dari semula 168.800 anggota jamaah menjadi 211.000 anggota jamaah. Selain pengembalian kuota, Pemerintah Arab Saudi juga menyetujui penambahan kuota haji Indonesia sebanyak 10.000 anggota jamaah.

Dari pemaparan diatas menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya mengirim TKI atau WNI ke nagara Timur Tengah khususnya Arab Saudi dan Iran. Tetapi Indonesia juga merupakan negara yang melakukan haji dan umrah terbesar di dunia Jika ketegangan Arab Saudi dan Iran terus berlanjut ke arah perang maka akan merugikan negara-negara regional disekitarnya atau negara-negara yang memilki kepentingan dikedua negara tersebut. hal itupun akan berdampak pada Indonesia sendiri, apabila terjadi perang maka akan mengancam keselamatan WNI di Arab Saudi dan Iran sehingga membutuhkan upaya ekstra keras dan biaya tidak sedikit untuk memastikan WNI di Timur Tengah aman dan dapat kembali ke Indonesia dengan aman. Oleh karenanya Indonesia mengajukan diri untuk menjadi mediator di konflik tersebut.

Adanya tuntutan dari Organisasi Internasional dalam negeri memberikan dukungan untuk memediasi konflik Arab Saudi dan Iran

Arab Saudi dan Iran merupakan dua negara berpengaruh. Arab Saudi tentu menjadi pusat kegiatan ritual Islam. Setiap tahun, jutaan umat Islam menuju dua masjid suci, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Madinah untuk menjalankan umarah dan Haji. Sedangkan Iran merupakan negara dari kerajaan kuno Persia yang menjadi bagian dari sejarah perkembangan peradaban manusia. Banyak intelektual muslim lahir dari sini sejak zaman awal Islam.

Konflik antara Arab Saudi dan Iran berawal ketika pemerintah Arab Saudi mengeksekusi mati seorang ulama Syiah yaitu Nimr Baqr al-Nimr. Eksekusi tersebut memancing kemarahan rakyat Iran sehari setelah eksekusi terjadi penyerangan terhadap kedutaan besar Arab Saudi di Teheran. Akhirnya, Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran. Dengan adanya ketegangan terhadap kedua negara tersebut. Indonesia sebagai negara yang memiliki hubungan baik dengan Arab Saudi dan Iran telah menawarkan diri untuk membantu upaya penyelesaian secara damai.

Hubungan Indonesia dengan Iran yang telah terjalin sejak akhir era 70-an semakin erat di era 90-an dan berlanjut hingga sekarang. Dengan adanya hubungan tersebut menjadi peluang Indonesia untuk masuk ke Iran dalam rangka melakukan perdamaian. Kepercayaan Iran terhadap Indonesia diperlihatkan dengan dukungannya di berbagai forum internasional termasuk untuk posisi ketua gerakan non-blok.

Selain dengan Iran, Indonesia juga memiliki hubungan baik dengan Arab Saudi. Indonesia juga memiliki *track record* hubungan baik dan harmonis. Kerjasama antar Indonesia dan Arab Saudi telah terjalin kuat, baik dalam politik, ekonomi maupun pendidikan. Dari segala segi posisi Indonesia memang sangat strategis untuk melakukan langkah mendamaikan. Langkah awal sudah di perlihatkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang tanggap meminta pemerintah untuk mengambil peran dalam meredakan konflik. Dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyiapkan beberapa langkah taktis. Salah satunya menggelar konferensi negara-negara sahabat. Sebuah bentuk usaha lain yang patut pula diberikan apresiasi terkait dengan mendekatkan kedua negara tersebut. Dalam konferensi tersebut Presiden Jokowi tidak hanya dihadiri negara-negara muslim yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) tapi seluruh negara yang peduli dengan perdamaian di Timur Tengah akan diundang

Kesimpulan

Konflik Arab Saudi dan Iran adalah konflik yang terjadi adanya faktor agama dan politik yang membuat ketidakstabilan keamanan di kawasan. Konflik tersebut telah berawal dari revolusi Iran hingga pengeksekusian seorang ulama Syiah yaitu Nimr Baqr al-Nimr. Pengeksekusian ulama Syiah yang dilakukan oleh Arab Saudi ini mendapat respon dari masyarakat Iran. Sehari setelah eksekusi al-Nimr terjadi penyerangan terhadap kedutaan besar Arab Saudi di Teheran. Dengan adanya penyerangan tersebut akhirnya, Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran. Keterlibatan Indonesia yang memiliki hubungan baik dengan Arab Saudi dan Iran untuk membantu upaya penyelesaian secara damai. Alasan Indonesia terlibat dalam pra mediasi konflik Arab Saudi dan Iran karena mendapat dukungan dalam negeri yang didukung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan terdapat beberapa kepentingan seperti kepentingan ekonomi dan sosial terhadap kedua negara tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Abbas, Syahrizal. (2009) "*Mediasi dalam perspektif hukum syariah, hukum adat dan hukum nasional*", Jakarta, Kencana
- K.J. Holsti dan M.Tahrir Azhari, *Politik Internasional : Kerangka Untuk Analisis*, edisi ke-4 jilid 2, Erlangga, Jakarta, 1983, hal.169-174.
- Mas'ood, Mochtar. (1990) *Ilmu Hubungan Internasional dan Metodologi*, Jakarta : PT Pustaka LP3ES.

Media Internet

Arab Saudi, Iran dan perebutan pengaruh kawasan mengutip dari www.nu.or.id/post/read/64848/arab-saudi-iran-dan-pengaruh-kawasan diakses pada 08 Januari 2016

Ini sosok al nimr tokoh syiah yang dieksekusi saudi mengutip dari <https://internasional.sindonews.com/read/1074072/43/ini-tokoh-sosok-al-nimr-yang-dieksekusi-saudi-1451808725&ei=zhwpWGV3&Ic=id-ID&s=1&m=240&host> diakses pada 03 Januari 2016.

Menguak latar belakang krisis diplomatik Arab Saudi Iran 1 mengutip dari http://www.kompaiana.com/menguak-latar-belakang-krisis-diplomasi-arab-saudi-iran-1_56a6f228bd22bddd057b875d diakses pada tanggal 26 Januari 2016.

Indonesia memediasi konflik Arab Saudi dan Iran mengutip dari <http://nasional.kompas.com/read/2016/01/12/15000071/Indonesia.dan.Mediasi.Konflik.Arab.Saudi-Iran>

Pertalian racun iran dan arab saudi mengutip dari <http://www.dw.com/id/pertalian-racun-iran-dan-arab-saudi/g-18956857> diakses pada 1 Agustus 2016

Sejarah panjang perselisihan arab saudi dan iran mengutip dari <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160105133321-120-102293/sejarah-panjang-perselisihan-arab-saudi-dan-iran/> diakses pada 1 Agustus 2016

Ini jalan panjang konflik saudiiran dari revolusi hingga insiden makkah mengutip dari <http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/16/01/05/o0eqy0377-ini-jalan-panjang-konflik-saudiiran-dari-revolusi-hingga-insiden-makkah-part5> diakses pada 1 Agustus 2016

Konflik timur tengah irananggapi pemutusan hubungan arab saudi mengutip dari <http://www.solopos.com/2016/01/05/konflik-timur-tengah-iran-tanggapi-pemutusan-hubungan-arab-saudi-677405> diakses pada 1 Agustus 2016

Jokowi dorong stabilitas kawasan untuk cegah terorisme mengutip dari <http://mediaindonesia.com/news/read/29108/jokowi-dorong-stabilitas-kawasan-untuk-cegah-terorisme/2016-02-16>

Presiden Jokowi dorong asean as bantu perdamaian di laut tiongkok selatan dan timur tengah mengutip dari <http://setkab.go.id/presiden-jokowi-dorong-asean-as-bantu-perdamaian-di-laut-tiongkok-selatan-dan-timur-tengah> diakses pada tanggal 16 Februari 2016

OKI dan Indonesia ditengah perseteruan Iran dan Saudi mengutip dari <http://www.gatra.com/kolom-dan-wawancara/199239-oki-dan-indonesia-ditengah-perseteruan-iran-saudi> diakses pada 04 Mei 2016

Kunjungan raja salman mendag:Arab saudi fokus penting ekspor nasional mengutip dari www.kemendag.go.id pdf

Peluang ekspor ke Iran mengutip dari http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/publication/2481421056847.pdf

Ekspor impor perdagangan Indonesia mengutip dari www.kemendag.go.id

Posisi Iran dimata Indonesia (memaknai kunjungan Jokowi ke Teheran) mengutip dari <https://seword.com/luar-negeri/posisi-iran-dimata-indonesia-memaknai-kunjungan-jokowi-ke-teheran> diakses pada 19 Desember 2016